

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM KESETARAAN GENDER
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI
DKI JAKARTA TAHUN 2019**

Faizah Julina, S.Psi, M.A¹; Dwi Agustina, S.IP,MPA²; Fransiskus Laia³

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

faizahjulina@gmail.com; dwiagustina1808@gmail.com; fransiskuslaia@gmail.com

Submitted: 25/12/2021; Revised: 28/12/2021; Published: 31/12/2021

Abstract

The demand for equal roles between men and women gives rise to the concept of gender equality due to the rampant sexist reactions and rejection of feminine thinking from some men who have long been comfortable with social conditions that prioritize their position in several governmental institutions or agencies. This can be seen in city government, parliament, and other government offices most of which are still occupied by men rather than women. This research is a qualitative descriptive study. Data collection was carried out through in-depth interviews with relevant and reliable informants. This research was conducted to analyze the implementation of the gender equality program in the National and Political Unity Agency of DKI Jakarta Province in 2019 using the Orinton Purba theory. This theory states that there are four factors that influence gender equality analysis, namely access, control, participation and benefits. From this research, it was found that there is an obstacle in the implementation of gender equality program, namely the lack of government attention. Some of the efforts made by the National and Political Unity Agency of DKI Jakarta Province to overcome this obstacle are providing direction and information as political science knowledge for women so that they can participate and become part of government organizations and political parties so that they are able to occupy legislative seats and meet the 30% quota for women.

Keywords: *gender equality, The Role of Women in Politics*

Pendahuluan.

Tuntutan kesamaan peran antara laki-laki dan perempuan yang menimbulkan konsep kesetaraan gender. Karena sering kali ditemukan rasis terhadap pemikiran feminim yang mendapatkan banyaknya penolakan dari laki-laki yang sudah lama nyaman dengan kondisi sosial yang memprioritaskan kaumnya dan permasalahan lainnya yaitu menuntut kesamaan hak dan derajat antara laki laki dan perempuan dari paham paham dan tatanan biologis yang sudah berakar dan secara amat jelas membedakan peran sosial dan budaya dari masing-masing jenis kelamin, yang diantara

mereka peran sudah terbagi dengan jelas, namun dengan perederan perubahan pola pikir sekarang ini semakin dipertanyakan.

Tentunya akan ditemui bermacam kondisi yang menjadi pendorong dan juga penghambat keberhasilan pencapaian kesetaraan gender tersebut. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan untuk mencegah timbulnya gejala yang diwarnai kekerasan dan permusuhan yang hingga bisa jadi keluar dari koridor hukum yang ada, dari Pro dan Kontra tuntutan kesetaraan Gender.

Kajian Pustaka

Pengertian gender Menurut Eviota (Farida, 2018: 6), Gender adalah perbedaan - perbedaan (diktomi) sifat laki - laki dan perempuan yang tidak berdasarkan biologis, akan tetapi pada hubungan sosial - sosial dan budaya antara laki laki dan perempuan yang dipengaruhi oleh struktur masyarakatnya.

Menurut Mansour Fakih 1994 (Farida 2018: 6), memberi pengertian “Gender adalah sebagai sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya.”

Menurut Moore 1998 (Farida 2018: 6) Mengemukakan, “Gender adalah sebagai konstruksi sosio kultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminine.”

Dapat dikatakan gender bukanlah suatu yang alamiah yang membedakan laki - laki dan perempuan, tapi sesuatu kondisi sosial dan budaya dari lingkungan masyarakatnya yang membentuk perbedaan hak dan kewajiban antara laki laki dan perempuan.

Analisis Program Kesetaraan Gender yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam programnya, dengan menggunakan teori Orinton Purba tentang analisis gender yaitu sebuah Analisa yang digunakan oleh pembuatan kebijakan, perencanaan untuk menilai kelayakan dan dampak kebijakan yang berbeda bagi perempuan dan laki laki atas program atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan.

Menurut Orinton Purba dalam Konsep Dan Teori Gender (2010), untuk dapat melakukan analisis gender, kita perlu memahami faktor - faktor Indikator gender, yaitu:

1. Akses; faktor ini diperlukan untuk mengukur seberapa besar peluang atau kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu).

2. Kontrol; merupakan kekuasaan untuk memutuskan bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan.
3. Partisipasi; adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, dalam pengambilan keputusan dalam pembangunan. Faktor ini berguna untuk melihat proporsi dari laki-laki atau perempuan yang termarginalisasi baik secara kelas, suku, ras maupun budaya.
4. Manfaat; adalah hasil-hasil dari suatu proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki. Apakah manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin.

Dari teori Orionton Purba dan indikatornya akan digunakan peneliti dalam menganalisis Program Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Dki Jakarta dalam programnya, untuk mengetahui upaya dan hambatan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Dki Jakarta terhadap peluang Perempuan dan laki laki dalam peran, fungsi, kedudukannya, dan partisipasi terhadap segi politik, pembangunan dan sosial.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan bagian terkait yang dapat dipercaya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dengan usus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013).

Pembahasan

Analisis Pelaksanaan Program Kesetaraan Gender di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disingkat menjadi Badan Kesbangpol, merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusa pemerintahan kesatuan dan politik, Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang

kepala Badan Kesbangpol yang berkududukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pada Program Kesetaraan Gender di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu implementasi program dari strategi dan arah kebijakan (Renstra) dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam mendukung dan menyelaraskan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022. Dalam hal ini, SKPD Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta mendukung pelaksanaan misi ke – 3 dan ke – 5 dari total jumlah 5 (lima) misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 – 2022).

1. Fungsi dan Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta terhadap Program Kesetaraan Gender

Badan Kesbangpol mempunyai fungsi Sebagai Berikut:

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan (perspektif gender) dalam proses politik dan pembangunan.
- b. Peningkatan wawasan dan pengetahuan politik bagi kaum perempuan khususnya di parlemen sehingga bisa menjadi mitra handal Pemda dalam pembuatan kebijakan.
- c. Untuk menambah wawasan dan menghasilkan *output* yang bermanfaat dalam upaya peningkatan kapasitas perempuan di Lembaga Politik dalam rangka kesetaraan gender serta implementasinya di Indonesia dan khususnya di Provinsi DKI Jakarta.
- d. Mendorong keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif agar meningkat. Hal ini merupakan implementasi dari Undang–Undang No 2 Tahun 2008 yang memuat kebijakan yang mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat.

Tugas Tugas Pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 adalah Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

2. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Provinsi DKI Jakarta

Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta dalam programnya kesetaraan gender, antara lain:

- a. Visi; terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, demokratis, berketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- b. Misi;
 - 1) Meningkatkan pemahaman ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara dan pembauran kebangsaan untuk memperkuat Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Meningkatkan Ketahanan ekonomi, seni, budaya, beragama dan organisasi kemasyarakatan yang sejahtera dengan menjunjung Nilai-nilai kebinekaan, toleransi dalam memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia.
 - 3) Meningkatkan pemahaman budaya politik yang demokratis dan membangun kemitraan kelembagaan politik yang harmonis
 - 4) Meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta penanganan konflik yang memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa
 - 5) Memelihara sinergitas koordinasi di bidang intelijen daerah terhadap kerawanan sosial serta perlintasan dan pergerakan orang asing, tenaga kerja asing dan ormas asing.
 - 6) Meningkatkan transparansi pelayanan publik urusan Kesbangpol.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas, analisis pelaksanaan program kesetaraan gender dibadan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta Tahun 2019 serta mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam Analisis Pelaksanaan Program kesetaraan gender yang dilaksanakan di badan kesatuan dan politik, dalam program tersebut, Badan kesbangpol memberikan pengarahan dan informasi yang meningkatkan pengetahuan peserta dalam dunia politik dan juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan, untuk berani menjadi bagian dari lembaga politik yang menduduki kursi legislatif dan memenuhi kuota 30% perempuan dalam parlemen.
2. Hambatan pada program kesetaraan gender yang dilaksanakan di badan kesbangpol yaitu, belum semua perhatian pemerintah atau pemangku kepentingan menjadikan

program kesetaraan gender ini penting, dibuktikan dari kurangnya dana untuk melakukan kegiatan program kesetaraan gender tersebut.

3. Dan Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol terhadap program kesetaraan gender yaitu dengan memberikan informasi kepada seluruh organisasi perempuan atau sayap parpol perempuan bahwa badan kesbangpol mempunyai program kesetaraan gender. Dan untuk memberi kesan nyaman pada program tersebut badan kesbangpol mengadakannya di daerah luar kota Jakarta yaitu bogor. Dan juga organisasi perempuan dan sayap parpol perempuan membantu upaya program kesetaraan gender tersebut dengan mengirimkan kader perempuan untuk mengikuti program tersebut. Badan kesbangpol juga memberikan bantuan keuangan kepada pihak organisasi perempuan atau sayap parpol perempuan guna untuk Pendidikan politik perempuan.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk badan Kesbangpol terhadap kesetaraan gender, adalah sebagai berikut:

1. Badan Kesbangpol dapat menambah alokasi dana untuk pelaksanaan program kesetaraan gender agar berjalan sepenuhnya dengan baik.
2. Badan Kesbangpol harus meningkatkan sosialisasi atau pembinaan sebagai dukungan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan dan partisipasinya dalam dunia politik.
3. Pemerintah atau instansi terkait harus memberikan perhatian lebih dalam supaya pelaksanaan program kesetaraan gender di DKI Jakarta berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Aan Komariah, Djam'an Satori. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, Komaruddin. 2007. *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fadilah, Sri. 2018. *Kesetaraan Gender: Fenomena Pergeseran Peran Ekonomi Wanita Dari Tulang Rusuk Menjadi Tulang Punggung*. Mitra Gender, Jurnal Gender dan Anak.
- Fakih, Mansour. 2010. *Analisis Gender dalam Transformasi Sosial*. Catatan ke 13. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Glas Saskia, Spierings, Niels. Lubbers, Marcel. and Scheepers Peer. 2019. *How Politics Shape Support for Gender Equality and Religiosity's Impact in Arab Countries*. Vol III, No (3)
- Handayani. Sutri. Utomo, Priyo. 2019. Analisis Kesetaraan Gender Di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Volume II, No (2).
- Hanum, Farida. 2018. *Kajian dan Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing.
- Indardi, S, Sjamsudin. 2016. *Dasar - Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang:Intrans Publishing.
- Kondrad Kebung. 2011. *Sebuah pendekatan Feminisme dan Antropologi*. NTT: Penerbit Nusa Indah.
- Maimanah, Sitti. Paranoan, DB. Amin, Jamal. 2015. Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Administrative*. Vol III, No (1).
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moore, Henrietta L. 1988. *Feminism and Anthropology*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Mulyadi, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian Praktis Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Publica Press.
- Penyusun Badan Pusat Statistik Jakarta Tim. 2019. *Provinsi Dki Jakarta Dalam Angka 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Jakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Probosiwi, Ratih. 2015. perempuan dan perannya dalam pembangunan kesejahteraan sosial (*Women and Its Role on Social Welfare Development*. Volume III, No (1)
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____, dkk. 2013. *Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____. 2014. *Budaya dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia
- Umriana, Anila. Hasyim, Moh, Fauzi. Hasanah, Hasyim. 2016. Penguatan Hak Asas Perempuan Dan Kesetaraan Gender Melalui Dialog Warga. Volume XII, No (1).